**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat kepada Pemerintah adalah Laporan atas Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi yang dilaksanakan Dinas selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Tahunan. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara komprehensif dimaksud adalah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, responsif, dan akuntabel dan sekaligus sebagai bagian dari system manajemen pemerintahan daerah, yaitu mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, pengendalian dan monitoring, evaluasi, serta pelaporan.

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat selalu berupaya menerapkan konsep *good governance* dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan .Salah satu prinsip dalam konsep *good governance* adalah prinsip akuntabilitas. Dalam rangka menjalankan prinsip akuntabilitas tersebut di atas, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menyusun dan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Untuk itu Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagai pelaksana pemerintah dibidang kehutanan, memiliki peranan penting dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan di Provinsi Sumatera Barat.

* 1. **Tujuan**

Tujuan Pembuatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 adalah untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata kepemerintahan yang baik khususnya pada Bidang Kehutanan.